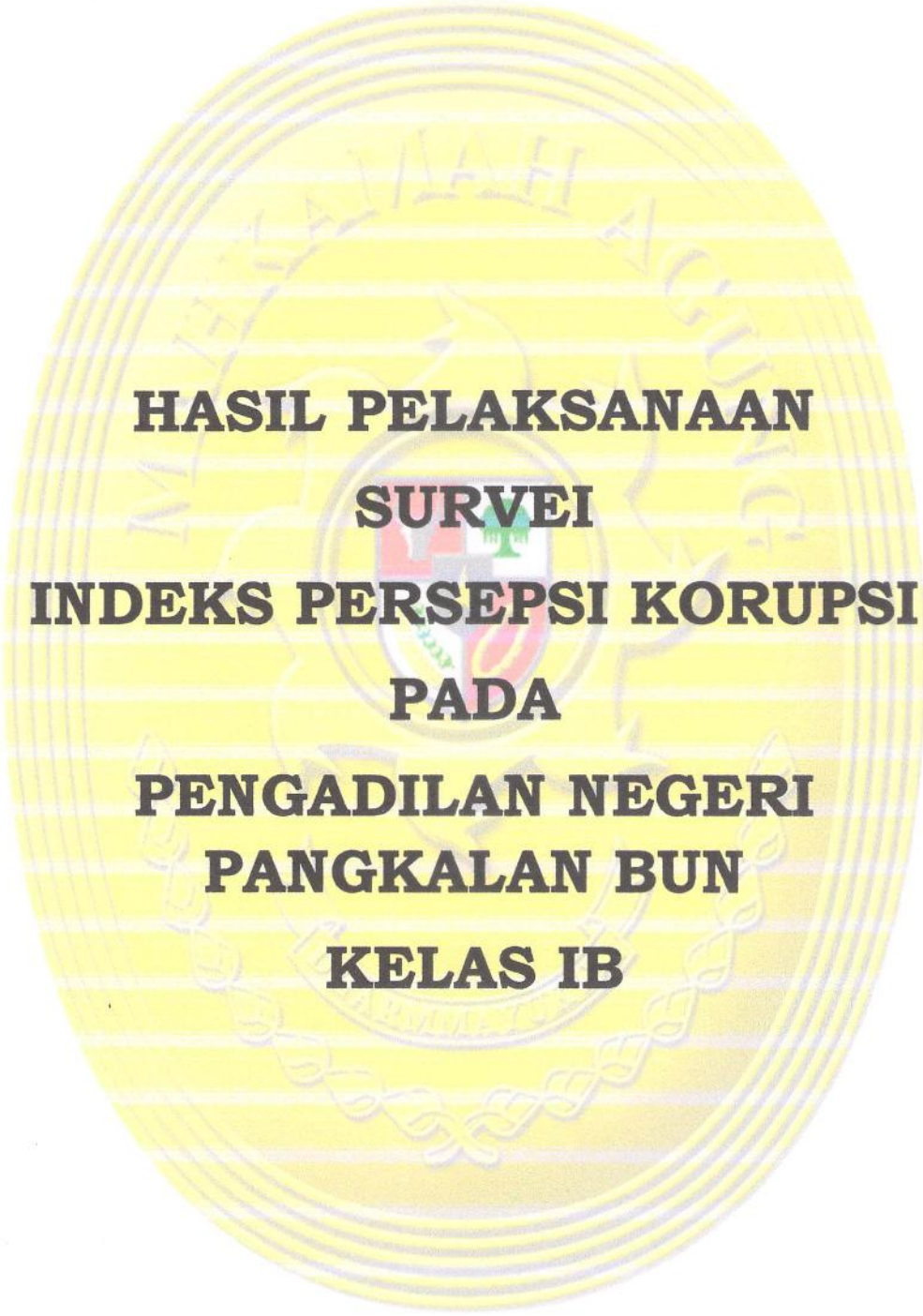


LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN
KELAS IB**

**Periode Januari – Juni
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB periode Januari 2021 s/d Juni 2021. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Indeks Persepsi Korupsi. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Indeks Persepsi Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

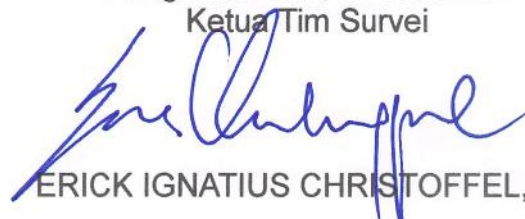
Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB melaksanakan Survei Indeks Persepsi Korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Indeks Persepsi Korupsi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta untuk memenuhi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 tanggal 13 April 2016 dan Nomor 608/DJU/PS02/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Survei Indeks Persepsi Korupsi terhadap layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB.

Laporan hasil survei ini berisikan elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. Laporan ini memberikan data dan informasi tentang tingkat Indeks Persepsi Korupsi yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil Survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan utama pada masing-masing Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB serta sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 01 Juli 2021
Ketua Tim Survei



ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Rencana Kerja	2
BAB II METODOLOGI	
Metode Penelitian	4
1. Populasi dan Sampel	4
2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisa	4
3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	5
4. Teknik Analisa Data.....	5
5. Tahapan Pelaksanaan	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	
A. Profil Responden.....	8
1. Tingkat Pendidikan Responden.....	8
2. Pekerjaan Responden	8
3. Domisili Responden	9
4. Kelompok Usia Responden	9
5. Layanan yang Digunakan	10
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	10
1. Indikator Manipulasi Peraturan.....	10
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	10
3. Indikator Menjual Pengaruh.....	10
4. Indikator Transparansi Biaya.....	10
5. Indikator Biaya Tambahan.....	11
6. Indikator Hadiah, mendapat.....	11
7. Indikator Transparansi Pembayaran.....	11
8. Indikator Percaloan.....	11
9. Indikator Perbuatan Curang.....	11
10. Indikator Transaksi Rahasia.....	12
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	12
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	17
Rekomendasi.....	17
Pengantar Kuisisioner IPK.....	19
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Pelaksana
- b. Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- c. Penyiapan Bahan
- d. Kuesioner.
- e. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- f. Kelengkapan peralatan.
- g. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- h. Jumlah Responden.
- i. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- j. Penyusunan Jadwal
- k. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengolahan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh Responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya diolah untuk membuat laporan.

3. Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat Responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas Responden.

4. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam beberapa periode semester.

BAB II METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan datang ke kantor dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu antara Januari – Juni 2021. Selanjutnya data diolah untuk laporan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Pengawas (Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum). Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan Responden, sekaligus memastikan apakah Responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Pertama*, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
- b. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian

dikonversikan ke angka 0-100.

- c. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

5. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan

6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Tingkat pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan S-1 yaitu 21 Responden (15,27 %).

Tabel 4. Tingkat pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak menyebutkan pendidikan	10
2	SD	1
3	SMP	0
4	SMA	15
5	Diploma	3
6	Sarjana (S1)	21
7	Pasca Sarjana (S2)	5
8	Doktor (S3)	1
Total		56

Keterangan : 10 Responden tidak mengisi keterangan Pendidikan

2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan Responden, menunjukkan bahwa diketahui sebanyak 8 Responden (14,29 %) Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Advokat.

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah
1	ASN / PNS	3
2	TNI / POLRI	6
3	Karyawan Swasta	1
4	Wiraswasta	2
5	Petani / Nelayan	0
6	Rohaniawan	0

7	Pelajar / Mahasiswa	0
8	Advokat / Pengacara	8
9	Ibu Rumah Tangga	1
10	Wartawan	0
11	Tidak Menyebutkan Pekerjaan	10
12	Lainnya	13
Total		56

Keterangan : 10 Responden tidak mengisi keterangan Pekerjaan dan 13 Responden mengisi pekerjaan lainnya

3. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, Responden paling banyak berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 49 Responden (83,93 %).

Tabel 6. Domisili Responden

NO	DOMISILI	JUMLAH
1	Kotawaringin Barat	47
2	Sukamara	9
	Total	56

Keterangan : 5 Responden tidak mengisi keterangan Domisili

4. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun sebanyak 22 Responden (39,29 %).

Tabel 7. Usia Responden

NO	USIA	JUMLAH
1	18-28 Tahun	12
2	29-39 Tahun	22
3	40-50 Tahun	10
4	>50 Tahun	1
5	Tidak menyebutkan usia	11
	Total	56

Keterangan : 11 Responden tidak menyebutkan Usia

5. Layanan yang digunakan

Layanan Perdata menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh Responden, yaitu sebanyak 19 Responden (33,93 %).

Tabel 8. Jenis Layanan yang Dipergunakan Responden

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH
1	Perdata	19
2	Pidana	11
3	Hukum	7
4	Umum	6
5	Tidak Menyebutkan Layanan yang Diperlukan	13
	Total	56

Keterangan : 13 Responden tidak mengisi keterangan layanan yang dipergunakan

B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,98 dengan jumlah Responden sebanyak 56 Orang yang terdiri dari 55 Orang menilai selalu sesuai prosedur dan 1 orang menilai sering sesuai prosedur. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Bersih dari Manipulasi Peraturan.

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 56 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa menyalahgunakan jabatan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah

Responden sebanyak 56 Orang yang keseluruhannya menilai tidak ada petugas menjual pengaruh. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.

4. Indikator Transparasi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparasi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,96 dengan jumlah Responden sebanyak 56 Orang yang terdiri dari 54 Orang menilai selalu mengedepankan tranparansi biaya dan 2 orang menilai sering mengedepankan tranparansi biaya. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam hal tarif dan biaya.

5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,95 dengan jumlah Responden sebanyak 56 Orang yang terdiri dari 55 Orang menilai selalu sesuai tarif tanpa ada biaya tambahan dan 1 orang menilai sering sesuai dengan tarif tanpa ada biaya tambahan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari biaya tambahan/pungli.

6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,95 dengan jumlah Responden sebanyak 56 Orang yang terdiri dari 55 Orang menilai tidak ada memberikan hadiah dan 1 orang menilai jarang memberi hadiah. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih karena tidak menerima hadiah yang tidak sah.

7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,98 dengan

jumlah Responden sebanyak 56 Orang yang terdiri dari 55 Orang menilai selalu dilakukan transparansi pembayaran dan 1 orang menilai sering dilakukan transparansi pembayaran. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan selalu memberikan bukti pembayaran yang sah.

8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 56 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada praktek percaloan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dan bersih dari praktik percaloan.

9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 56 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada perbuatan curang. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak terdapat perbuatan curang kearah KKN.

10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 56 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada transaksi rahasia. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari praktik pengurusan perkara.

C. INDEKS PERSEPSI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar **3,98**.

Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,98**.

Tabel 9.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Data Responden

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Keterangan
1.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

17.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44.	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
45.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48.	4	4	4	3	1	1	4	4	4	4	

49.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
52.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
53.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
54.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
56.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	240	240	237	240	240	240	240	237	238	240	
Nilai Rata-Rata	3.98	4.00	4.00	3.96	3.95	3.95	3.98	4.00	4.00	4.00	
											1
NRR Tertimbang	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	3,982
											10
											0.1

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

IPK : Indeks Persepsi Korupsi

*) : Jumlah NRR IPK Tertimbang

NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi

Jumlah kuesioner yang terisi

IPK : 3.98

Jumlah Responden 56

Bobot

Unsur Pertanyaan

Bobot NRR Tertimbang

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1,76-2,50	43,76-62,50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Rangking
Q 1	Manipulasi Data	398	II↑ III↓
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	400	I↑
Q 3	Menjual Pengaruh	400	I↑
Q 4	Transaksi Biaya	396	III↑ II↓
Q 5	Biaya Tambahan	395	I↓
Q 6	Hadiah	395	I↓
Q 7	Tranparansi Biaya	398	II↑ III↓
Q 8	Percaloan	400	I↑
Q 9	Perbuatan Curang	400	I↑
Q 10	Transaksi Rahasia	400	I↑
JUMLAH		3.982	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai 3,98 atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Bahwa apabila disusun peringkat 1 sampai dengan 3 tertinggi dalam indikator penilaian ini adalah peringkat pertama ada pada 5 indikator secara bersamaan yaitu Indikator Penyalahgunaan Jabatan, Indikator Menjual Pengaruh, Indikator Percaloan, Indikator Perbuatan Curang, dan Indikator Transaksi Rahasia yang masing-masing memperoleh indeks sempurna yaitu 4,00. Kemudian peringkat kedua ada pada dua indikator yaitu Indikator Manipulasi Data dan Indikator Transparansi Biaya yang memperoleh masing-masing nilai 3,98. Setelah itu peringkat ketiga adalah Indikator Transaksi Biaya dengan nilai 3,96.

Sedangkan peringkat tiga terendah adalah Indikator Biaya Tambahan dan Indikator Hadiah yang sama-sama memiliki indeks paling rendah yaitu 3,95 sebagai peringkat pertama. Kemudian diikuti Indikator Transparansi Biaya yang mendapat indeks 3,96 sebagai indikator terendah kedua disusul indikator manipulasi peraturan bersama indikator transparansi pembayaran yang berada di peringkat ketiga terendah dengan indeks 3,98.

B. Rekomendasi

Semua unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun perlu mempertahankan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang berkualitas kedepannya, karena tuntutan masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kedepannya adalah konsisten dalam pelayanan. Meskipun dalam survei periode Januari – Juni 2021 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memperoleh peningkatan penilaian dari masyarakat dengan nilai 3,98 atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadikan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpuas diri, hal tersebut harus konsisten dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Ruang lingkup indikator biaya tambahan dan indikator hadiah yang sama-sama memiliki indeks paling rendah yaitu 3,95 dengan predikat hasil survei terendah pertama. Diharapkan kepada petugas PTSP untuk lebih menjelaskan secara rinci mengenai biaya tambahan pada perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat tidak salah menafsirkan biaya tambahan yang dikeluarkan sebagai biaya yang tidak resmi. Kemudian untuk indikator hadiah perlu diketahui bahwa PN Pangkalan Bun telah memiliki Tim Pengendalian Gratifikasi dan juga telah dilaksanakan kampanye public anti gratifikasi, maka dari itu apabila masyarakat mengalami ataupun melihat praktik gratifikasi dapat melaporkannya melalui nomor yang telah disediakan pada banner anti gratifikasi;

Untuk ruang lingkup Transparansi Biaya PN Pangkalan Bun sudah menyediakan layar monitor yang berisi daftar biaya resmi terkait pelayanan PN Pangkalan Bun yang berada pada ruangan PTSP. Penyediaan layar monitor yang berisi daftar biaya resmi tersebut menjadi indikator transparansi biaya bagi masyarakat dalam hal biaya sehingga tidak menimbulkan persepsi ataupun keraguan terhadap biaya yang dikeluarkan selama mendapatkan layanan di PN Pangkalan Bun;

Kemudian untuk indikator manipulasi peraturan bersama indikator transparansi pembayaran diharapkan dicantumkan dasar hukum pada setiap formulir pelayanan yang akan dipergunakan oleh masyarakat. Sedangkan untuk indikator transparansi pembayaran masih berkaitan dengan indikator transparansi pembayaran, agar Petugas PTSP senantiasa menjelaskan metode pembayaran sesuai SOP yang berlaku.

1. Hendaknya hasil survei segera ditindaklanjuti melalui rapat demi terpenuhinya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Kelas I B Pangkalan Bun.
2. Hasil survei kepuasan masyarakat ini dapat menjadi bahan/data acuan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I B Pangkalan Bun dalam mengambil kebijakan yang konstruktif kedepannya.
3. Survei persepsi korupsi ini hendaknya terus dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah Responden yang semakin banyak dari setiap periode survei, agar supaya data yang didapatkan menjadi lebih valid dan representative.



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Telepon : (0532) 21014 – 21179
Pangkalan Bun Kode Pos 7 4 1 1 1

Website: www.pn.pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor : W16-U3/01/PB.01/I/2021

Para Pengguna Pengadilan yang terhormat,

Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada para pengguna pengadilan sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Pangkalan Bun “PRIMA” Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel untuk mewujudkan institusi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mengetahui kondisi riil pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun saat ini terkait dengan hal di atas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengadakan Survei Persepsi Korupsi dengan melibatkan para pengguna pengadilan sebagai Responden. Mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr(i) para pengguna pengadilan berkenan mengisi kuesioner yang kami edarkan dengan sejujurnya dan apa adanya. Jawaban Bapak/ibu atas pertanyaan di dalam kuesioner ini hanya semata-mata untuk meningkatkan layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Atas partisipasi Bapak/Ibu sekalian kami ucapkan terimakasih.



Pangkalan Bun, 04 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun


MUHAMMAD RAMDES, S.H.

Dasar Hukum:

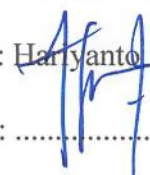
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

PETUGAS PELAKSANA :

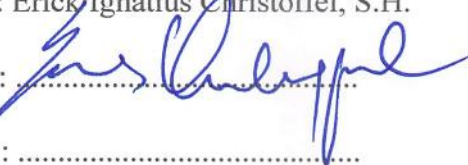
1. Petugas :

- Nama : M. Guntur, S.H.
- Tanda Tangan : 
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama :  Harryanto
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama : Erick Ignatius Christoffel, S.H.
- Tanda Tangan : 
- Tanggal Pelaksana :

PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN
KORUPSI MENGACU KEPADA PERMENPAN &
RB NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU
WBK & WBMM

TABEL II BENTUK MUTU PELAYANAN

**INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS 1 B
SEMESTER I TAHUN 2021**

NILAI IPK

3,98

Nilai Interval Konversi IPK :
3,26 – 4,00 = (81,26 – 100,00)

Kinerja:

Nilai 3,98 =

(BERSIH DARI KORUPSI)

NAMA LAYANAN

RESPONDEN

- ✓ Jumlah Responden : 56 Orang
- ✓ Jenis Kelamin :
L = 42 Orang / P = 8 Orang
Tidak menyebutkan jenis kelamin = 6
Orang
- ✓ Pendidikan :
Tidak Sekolah = - Orang
SD = 1 Orang
SMP = - Orang
SMA = 15 Orang
Dip = 3 Orang
S1 = 21 Orang
S2 = 5 Orang
S3 = 1 Orang
Tidak menyebutkan pendidikan = 10 Orang

Periode Survei =
(04-01-2021) s/d (30-06-2021)

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

KOORDINATOR TIM SURVEI

TTD

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

Kuisisioner IPK :

No	Pertanyaan	Jawaban	Nilai
1.	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Tidak Sesuai Prosedur b. Jarang Sesuai Prosedur c. Sering Sesuai Prosedur d. Selalu Sesuai Prosedur	1 2 3 4
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan	1 2 3 4
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
5.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
9.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4

Berdasarkan Survei Elektronik yang digunakan pada periode 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk

Kuisiener IPK :

Pertanyaan-Pertanyaan Survei						
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Eksternal						
1.	Pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	1	2	3	4	
2.	Dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah, disertai dengan adanya penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4	
4.	Dipersulit dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (transparansi Biaya)	1	2	3	4	
5.	Diminta untuk membayar tidak sesuai tariff resmi atau ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4	
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	1	2	3	4	
7.	Tidak menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran? (Transparansi Pembayaran)	1	2	3	4	
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)	1	2	3	4	
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4	
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4	

Berdasarkan Survei Elektronik yang digunakan pada periode 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021
<http://192.168.88.112/survei/administrator/index.php>

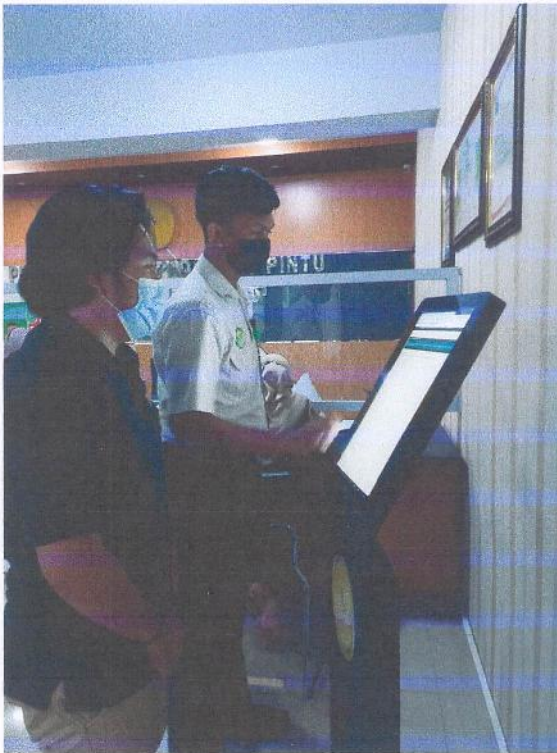


PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
KELAS IB
Jl. Sutan Syahrir No.16
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179
Website : www.pn-pangkalanbun.go.id
Email : pangkalanbunpn@gmail.com

**PENJAMINAN MUTU DAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

Nomor	:	W16-U3/01/RPT/7/2021
Tanggal	:	14 Juli 2021
Halaman	:	Halaman 2 dari 2
Nama Tim	:	Tim Survei

DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN SURVEI DI PN PANGKALAN BUN PERIODE 04 JANUARI 2021 S/D 30 JUNI 2021



	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	Nomor	:	W16-U3/01/RPT/7/2021
		Tanggal	:	01 Juli 2021
		Halaman	:	Halaman 1 dari 4
		Nama Tim	:	Tim Survei

Perihal : Undangan Rapat Persiapan Pengolahan dan Penyusunan Data Survei IKM dan IPK Periode Januari s/d Juni 2021

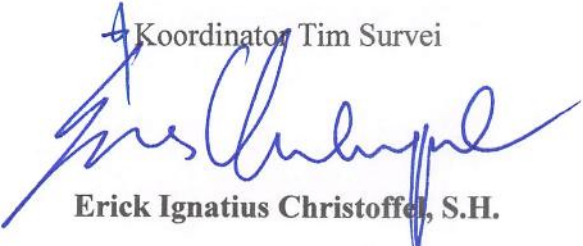
Kepada Yth : Seluruh Anggota Tim Survei IKM dan IPK PN Pangkalan Bun

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengolahan dan Penyusunan Data Survei IKM dan IPK Periode 04 Januari 2021 s/d 30 Juni 2021 maka perlu dilakukan persiapan dan dengan ini dimohon kehadirannya pada :

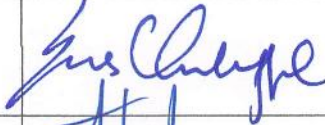




Hari/ Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021
 Pukul : 15.00 WIB s/d selesai;
 Tempat : Ruang Mediasi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Koordinator Tim Survei

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

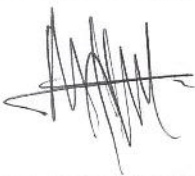
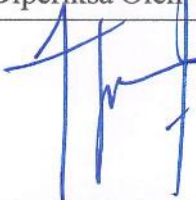
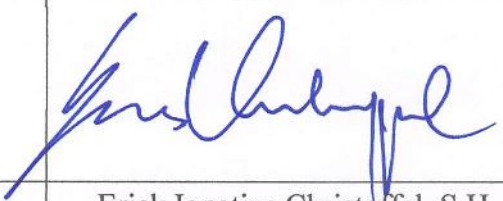
	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com	Nomor	:	W16-U3/01/RPT/7/2021
		Tanggal	:	01 Juli 2021
		Halaman	:	Halaman 2 dari 4
		Nama Tim	:	Tim Survei
PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS				

DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Erick I. Christoffel	Koordinator	
2	Hariyanto	Anggota	
3	HISKIA. J. ADITOMANG	Anggota	
4	M. Guntur.	Anggota	
5	EGA AYU ANANDA	ANGGOTA	
6			
7			
8			
9			

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com	Nomor	:	W16-U3/01/RPT/7/2021
		Tanggal	:	01 Juli 2021
		Halaman	:	Halaman 3 dari 4
		Nama Tim	:	Tim Survei
PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS				

NOTULENSI

Hari/ Tanggal Rapat	Kamis, 01 Juli 2021			Keterangan Lampiran	
Lokasi Rapat	Ruang Mediasi			<input type="checkbox"/>	Daftar Hadir
				<input type="checkbox"/>	Internal Memo
Mulai Waktu Rapat	15.00 WIB	Selesai	17.30 WIB		
Pokok Bahasan Rapat	Persiapan Pengolahan dan Penyusunan Laporan Hasil Survei IKM dan IPK				
Pimpinan Rapat	Erick Ignatius Christoffel, S.H.				
Anggota Rapat	1. Hariyanto 2. M. Guntur S.H. 3. Hizkia J. Aritonang 4. Ega Ayu Ananda				
Notulen Sekretaris	M. Guntur, S.H.				
Bahasan Materi Rapat :					
Pengolahan dan Penyusunan Laporan Hasil Survei IKM dan IPK					
Catatan :					
Agar pengolahan dan penyusunan laporan dilakukan bersama-sama secara cermat dan cepat					
Melalui Rapat merumuskan hal-hal sebagai berikut :					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dibagi peran dari masing-masing anggota tim dalam melakukan kegiatan pengolahan data dan penyusunan laporan; 2. Segera mengumpulkan data survey yang telah terkumpul pada aplikasi survey elektronik, yaitu pada aplikasi yang selama ini digunakan dan juga aplikasi survey Sisuper produk terbaru dari Badilum MARI; 3. Data survey terbagi secara rentang waktu yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 04 Januari s/d tanggal 30 Juni 2021 bersumber dari aplikasi survey yang selama ini telah digunakan; - Tanggal 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 bersumber dari aplikasi survey Sisuper Badilum MARI; Ini dilakukan mengingat aplikasi survey Sisuper Badilum MARI yang baru mulai dipergunakan pada tanggal 01 Juni 2021; 4. Selalu melakukan komunikasi terhadap update kegiatan pengolahan data dan penyusunan laporan IPK dan IPM kepada koordinator tim; 					
Dibuat Notulen	Diperiksa Oleh		Disahkan Ketua Tim		
					
M. Guntur, S.H..	Hariyanto		Erick Ignatius Christoffel, S.H.		



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
KELAS IB
Jl. Sutan Syahrir No.16
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179
Website : www.pn-pangkalanbun.go.id
Email : pangkalanbunpn@gmail.com

PENJAMINAN MUTU DAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Nomor	:	W16-U3/01/RPT/7/2021
Tanggal	:	01 Juli 2021
Halaman	:	Halaman 4 dari 4
Nama Tim	:	Tim Survei

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN



	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	Nomor	:	W16-U3/01/RPT/7/2021
		Tanggal	:	14 Juli 2021
		Halaman	:	Halaman 1 dari 5
		Nama Tim	:	Tim Survei

Perihal : Undangan Pengumuman dan Tindak Lanjut Hasil Survei IKM dan IPK Periode Januari s/d Juni 2021

Kepada Yth :

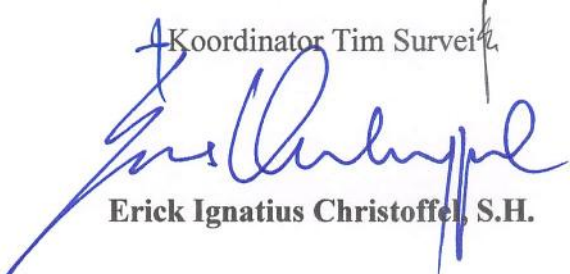
1. Wakil Ketua
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Para Hakim
5. Para Panitera Muda
6. Para Kepala Sub Bagian
7. Seluruh Anggota Tim Survey IKM dan IPK

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengumuman dan Tindak Lanjut Hasil Survei IKM dan IPK Periode tanggal 04 Januari 2021 s/d tanggal 30 Juni 2021 maka perlu dilakukan pertemuan dan dengan ini dimohon kehadirannya pada:

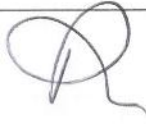


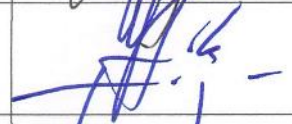

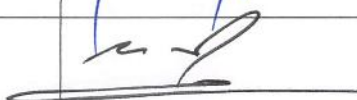


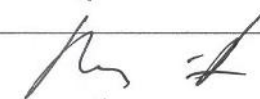

Hari/ Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
 Pukul : 09.00 WIB s/d selesai;
 Tempat : Ruang Mediasi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Koordinator Tim Survei

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com	Nomor	:	W16-U3/01/RPT/7/2021
		Tanggal	:	
		Halaman	:	Halaman 2 dari 5
		Nama Tim	:	Tim Survei
PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS				

DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	M. Randel	Wakil	
2.	Ench I. Christoffel	Hakim	
3.	Gottardus	Penitip	
4.	Heer Karyono	Hakim	
5.	A. Husin	Hakim	
6.	Yon b. ke s. m	Ke. 1012	
7.	Hock - R. M	fm. Ad	
8.	Juwani	M. Perada	
9.	Rer - A	Hakim	
10.	Haryanto	Pm Hkn	
11.			
12.			

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sultan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com	Nomor	:	W16-U3/01/RPT/7/2021
		Tanggal	:	14 Juli 2021
		Halaman	:	Halaman 3 dari 5
		Nama Tim	:	Tim Survei
PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS				

NOTULENSI

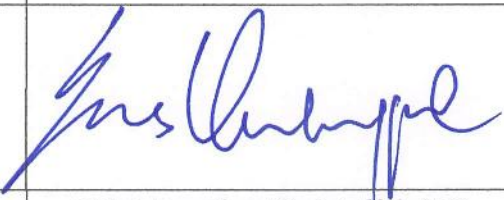
Hari/ Tanggal Rapat	Senin, 05 Juli 2021			Keterangan Lampiran	
Lokasi Rapat	Ruang Mediasi			<input type="checkbox"/>	Daftar Hadir
				<input type="checkbox"/>	Internal Memo
Mulai Waktu Rapat	15.00 WIB	Selesai	17.30 WIB		
Pokok Bahasan Rapat	Pengumuman dan Tindak Lanjut Hasil Survei IKM dan IPK				
Pimpinan Rapat	Wakil Ketua PN Pangkalan Bun				
Anggota Rapat	<i>Terlampir</i>				
Notulen Sekretaris	M. Guntur, S.H.				
Bahasan Materi Rapat : Menindaklanjuti beberapa indikator penilaian survey IKM dan IPK yang mendapat predikat tiga tertinggi dan tiga terendah;					
Catatan : Predikat yang diperoleh dari berbagai indikator penilaian survey IKM dan IPK tersebut merupakan cerminan dari penilaian yang masyarakat berikan terhadap layanan yang PN Pangkalan Bun berikan. Merespon penilaian itu, terhadap tiga indicator dengan predikat tertinggi untuk selalu dijaga bahkan ditingkatkan sedangkan terkhusus untuk tiga indicator dengan predikat terendah agar dilakukan koreksi walaupun sebenarnya predikat yang diberikan masih dalam kategori terbaik;					
Melalui Rapat merumuskan hal-hal sebagai berikut : Predikat yang diperoleh dari berbagai indicator penilaian survey IKM dan IPK tersebut merupakan cerminan dari penilaian yang masyarakat berikan terhadap layanan yang PN Pangkalan Bun berikan. Merespon penilaian itu, terhadap tiga indicator dengan predikat tertinggi untuk selalu dijaga bahkan ditingkatkan sedangkan terkhusus untuk tiga indicator dengan predikat terendah agar dilakukan koreksi walaupun sebenarnya predikat yang diberikan masih dalam kategori terbaik;					
IKM					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus Untuk ruang lingkup Biaya/Tarif, yang memperoleh hasil survei terendah pertama, Petugas PTSP dapat menjelaskan biaya/tarif pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara rinci sehingga diharapkan respon masyarakat pengguna pengadilan kedepannya dapat memahami terhadap jumlah biaya/tarif layanan dengan produk yang didapatkan. Dan perlu juga diketahui bahwa PN Pangkalan Bun dalam mengenai tarif/biaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Untuk ruang lingkup Produk spesifikasi jenis pelayanan, yang memperoleh hasil survei terendah kedua, diharapkan kepada petugas pelayanan harus lebih menjelaskan lagi lagi akan produk diberikan, sehingga masyarakat pengguna layanan yang datang ke Pengadilan tidak kesulitan mendapatkan produk yang mereka inginkan; 3. Khusus untuk ruang lingkup Prosedur, Kompetensi Pelaksana, serta Sarana dan Prasarana yang pada survei kali ini sama-sama memperoleh hasil survei terendah ketiga, diharapkan kepada seluruh hakim dan pegawai dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat, terutama para petugas pelayanan yang berada di PTSP dapat menjelaskan prosedur kepada masyarakat dengan gaya bahasa yang dapat mudah dipahami oleh Masyarakat namu tetap 					

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	Nomor	:	W16-U3/01/RPT/7/2021
		Tanggal	:	14 Juli 2021
		Halaman	:	Halaman 4 dari 5
		Nama Tim	:	Tim Survei

mengutamakan budaya 3S. Selain itu, petugas pelayanan diharapkan tetap mempedomani SOP dalam pelaksanaan di tiap bidang-bidang pelayanan PTSP sehingga kompetensi pelaksanaan tetap terpenuhi. Kemudian terhadap sarana dan prasarana yang berada di lingkungan PN Pangkalan Bun sedang dalam proses melengkapi yaitu salah satunya adalah mulai tersedianya penunjuk jalan bagi penyandang disabilitas.

IPK

1. Ruang lingkup indikator biaya tambahan dan indikator hadiah yang sama-sama memiliki indeks paling rendah yaitu 3,95 dengan predikat hasil survei terendah pertama. Diharapkan kepada petugas PTSP untuk lebih menjelaskan secara rinci mengenai biaya tambahan pada perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat tidak salah menafsirkan biaya tambahan yang dikeluarkan sebagai biaya yang tidak resmi. Kemudian untuk indikator hadiah perlu diketahui bahwa PN Pangkalan Bun telah memiliki Tim Pengendalian Gratifikasi dan juga telah dilaksanakan kampanye public anti gratifikasi, maka dari itu apabila masyarakat mengalami ataupun melihat praktik gratifikasi dapat melaporkannya melalui nomor yang telah disediakan pada banner anti gratifikasi;
2. Untuk ruang lingkup Transparansi Biaya PN Pangkalan Bun sudah menyediakan layar monitor yang berisi daftar biaya resmi terkait pelayanan PN Pangkalan Bun yang berada pada ruangan PTSP. Penyediaan layar monitor yang berisi daftar biaya resmi tersebut menjadi indikator transparansi biaya bagi masyarakat dalam hal biaya sehingga tidak menimbulkan persepsi ataupun keraguan terhadap biaya yang dikeluarkan selama mendapatkan layanan di PN Pangkalan Bun;
3. Kemudian untuk indikator manipulasi peraturan bersama indikator transparansi pembayaran diharapkan dicantumkan dasar hukum pada setiap formulir pelayanan yang akan dipergunakan oleh masyarakat. Sedangkan untuk indikator transparansi pembayaran masih berkaitan dengan indikator transparansi pembayaran, agar Petugas PTSP senantiasa menjelaskan metode pembayaran sesuai SOP yang berlaku.

Dibuat Notulen	Diperiksa Oleh	Disahkan Ketua Tim
		
M. Guntur, S.H..	Hariyanto	Erick Ignatius Christoffel, S.H.

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com	Nomor	:	W16-U3/01/RPT/7/2021
		Tanggal	:	14 Juli 2021
		Halaman	:	Halaman 5 dari 5
		Nama Tim	:	Tim Survei
PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS				

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

